



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019
KOTA PADANG PANJANG

Bagian Organisasi
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG

TAHUN 2019



KEMENTERIAN KEMAHAMATAN RI

REKAM DOKUMEN PEMILIHAN UMUM 2019

DAFTAR PEMILIHAN

Badan Penyelenggara

KEMENTERIAN KEMAHAMATAN RI

TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

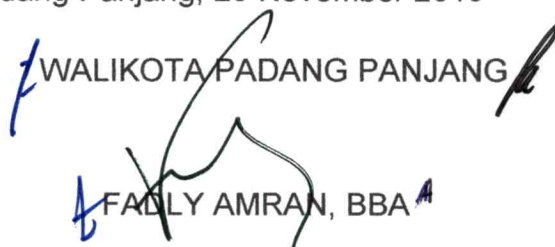
Alhamdulillah rabbil'alamiin Puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan izin-Nya penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2019 Kota Padang Panjang dapat diselesaikan. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2019 Kota Padang Panjang ini disusun karena sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2019 Kota Padang Panjang ini disusun mengacu pada RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Padang Panjang yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 143 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Kota Padang Panjang Tahun 2018- 2023 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2019 .

Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan ini merupakan kesepakatan kinerja antara Kepala Daerah dengan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh OPD sesuai dengan dokumen perencanaan daerah.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan masukan bagi penyelesaian penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2019 ini, dengan harapan kiranya hal ini dapat memberikan kontribusi terhadap pemerintahan dan pembangunan Kota Padang Panjang

Padang Panjang, 25 November 2019


WALIKOTA PADANG PANJANG
FADLY AMRAN, BBA

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	
<u>Latar Belakang</u>	
1.1 Dasar Hukum	1
1.2 Pengertian dalam Perjanjian Kinerja	3
1.3 Tujuan Perjanjian Kinerja	5
1.4 Ruang Lingkup Perjanjian Kinerja	5
1.5 Keterkaitan dengan Sistem AKIP	6
1.6 Format Perjanjian Kinerja	6
1.7 Sistematika Penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2019	7
BAB II STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI	
2.1 Sekretariat Daerah	8
2.2 Sekretariat DPRD	8
2.3 Inspektorat Kota	9
2.4 Dinas Daerah	10
2.5 Badan Daerah	11
2.6 Kecamatan	12
BAB III RENCANA STRATEGIK	
3.1 Visi	15
3.2 Misi	16
3.3 Tujuan	20

3.4 Sasaran	20
BAB IV PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN	
4.1 Pernyataan Perjanjian Kinerja Perubahan Kota	34
4.2 Perjanjian Kinerja Perubahan Kota	37
BAB V PENUTUP	
	23
LAMPIRAN	
Pernyataan Perjanjian Kinerja Perubahan OPD	
Perjanjian Kinerja Perubahan OPD	

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Perjanjian Kinerja Perubahan merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah, sekaligus sebagai pimpinan suatu instansi/unit organisasi kepada atasan langsungnya. Perjanjian Kinerja Perubahan juga menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimilikinya. Perjanjian Kinerja Perubahan ini kemudian disusun dan ditetapkan dalam bentuk dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan, dimana dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan ini merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Perjanjian Kinerja Perubahan ini merupakan salah satu bentuk implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Disebutkan bahwa perjanjian kinerja perubahan adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

2. Selanjutnya, pada Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, diamanatkan pada setiap akhir tahun setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah negara harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk mengarahkan setiap lembaga pemerintah menyusun akuntabilitas kinerja, maka pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

3. Sebagai tindak lanjut peraturan tersebut, Pemerintah Kota Padang Panjang berkewajiban menyusun dan menyampaikan perjanjian kerjanya kepada instansi berwenang. Secara teknis, penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan, tidak hanya

untuk Pejabat Struktural tingkat atas seperti pejabat setingkat Eselon II, namun juga untuk Pejabat Eselon III dibawahnya. Dengan demikian setiap Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, wajib menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja perubahan.

4 Perjanjian Kinerja Perubahan ini mengacu pada RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023. Selain itu, Perjanjian Kinerja Perubahan ini juga mengacu pada dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2019.

1.1 Dasar Hukum

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan Kota Padang Panjang Tahun 2019 antara lain adalah:

- 1) TAP MPR RI No XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 3) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
- 7) Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023;
- 8) Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 9) Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2019; dan

- 10) Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2019.

1.2 Pengertian dalam Perjanjian Kinerja Perubahan

Berikut ini diuraikan beberapa pengertian yang berkaitan dengan penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan Kota Padang Panjang Tahun 2019 yakni sebagai berikut :

- 1) Perjanjian Kinerja Perubahan mengandung arti sebagai tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Perjanjian Kinerja Perubahan juga merupakan suatu kontrak kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian Kinerja Perubahan ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimilikinya. Setelah ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2019.
- 2) Pernyataan Perjanjian Kinerja Perubahan merupakan suatu pernyataan kesanggupan dari pimpinan instansi/unit kerja penerima amanah kepada atasan langsungnya untuk mewujudkan suatu target kinerja tertentu.
- 3) Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
- 4) Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang ditetapkan.
- 5) Pemantauan kinerja adalah serangkaian kegiatan pengamatan perkembangan kinerja pelaksanaan program atau kegiatan dengan menggunakan informasi: (1) hasil pengukuran kinerja dan (2) identifikasi,

analisis serta antisipasi masalah yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

- 6) Instansi Pemerintah adalah sebuah kolektif dari unit organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meliputi Kementerian Koordinator/Kementerian Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota serta lembaga-lembaga pemerintah yang menjalankan fungsi pemerintahan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- 7) Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih baik spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
- 8) Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indikator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
- 9) Target kinerja merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai dalam satu tahun tertentu.
- 10) Indikator Kinerja maksudnya adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan, indikator kinerja dapat berupa *output* maupun *outcomes*.
- 11) Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBD dan/atau APBD.
- 12) Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada satu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.

1.3 Tujuan Perjanjian Kinerja Perubahan

Adapun yang menjadi tujuan umum dari Perjanjian Kinerja Perubahan ini adalah :

- 1) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
- 2) Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- 3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- 4) Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
- 5) Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Sedangkan tujuan khusus Perjanjian Kinerja Perubahan adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sehingga terdapat keseriusan dalam menjalankan amanah tersebut.
- 2) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
- 3) Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
- 4) Sebagai salah satu dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

1.4 Ruang Lingkup Perjanjian Kinerja Perubahan

Ruang lingkup Perjanjian Kinerja Perubahan mencakup seluruh tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang Panjang, dengan fokus utama adalah berbagai program utama yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2019 sesuai dengan RPJMD Kota Padang Panjang. Disamping itu juga ditetapkan program utama dari OPD yang meliputi program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu-isu strategis yang sedang dihadapi

organisasi atau tantangan kedepan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan tugas.

1.5 Keterkaitan dengan Sistem AKIP

Pada dasarnya, Perjanjian Kinerja Perubahan merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Perjanjian Kinerja Perubahan adalah bagian penting transparansi pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Dengan adanya penyusunan perjanjian kinerja perubahan ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

1.6 Format Perjanjian Kinerja Perubahan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Perubahan, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, format Perjanjian Kinerja terdiri atas dua bagian yaitu Formulir Pernyataan Perjanjian Kinerja Perubahan dan Lampiran Formulir Perjanjian Kinerja Perubahan mempedomani aturan tersebut, maka format perjanjian kinerja juga mempedomani hal tersebut :

1) Pernyataan Perjanjian Kinerja Perubahan

Pernyataan Perjanjian Kinerja Perubahan merupakan suatu pernyataan kesanggupan dari pimpinan instansi/unit kerja penerima amanah kepada atasan langsungnya untuk mewujudkan suatu target kinerja tertentu dalam hal ini Pemerintah Kota Padang Panjang untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan janji kesanggupan dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah (penerima amanah), kepada atasan langsung untuk Tahun 2019.

2) Lampiran Perjanjian Kinerja Perubahan

Lampiran Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kota Padang Panjang dan seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kota Padang Panjang yang memuat sasaran, indikator kinerja, target kinerja, Program dan kegiatan utama

serta jumlah anggaran yang dialokasikan, yang akan diwujudkan baik oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), maupun Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2019.

1.7 Sistematika Penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2019

Berikut ini sistematika penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2019 dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, dasar hukum, beberapa pengertian-pengertian yang berhubungan dengan Perjanjian Kinerja Perubahan, tujuan, ruang lingkup, keterkaitan dengan sistem AKIP, format dan sistematika penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan.

BAB II STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini menjelaskan tentang Struktural Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Padang Panjang.

BAB III RENCANA STRATEGIK

Bab ini menguraikan tentang Visi, Misi dan Penetapan Tujuan, Sasaran dan Cara Pencapaiannya.

BAB IV Perjanjian Kinerja Perubahan

Bab ini terdiri atas Perjanjian Kinerja Perubahan dan Lampiran yang berisi Sasaran Strategik, Indikator Kinerja, Target Kinerja, Program/Kegiatan dan Jumlah Anggaran yang dialokasikan.

BAB V PENUTUP

Bagian terakhir ini memuat beberapa poin penting sebagai kesimpulan dan saran tentang Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kota Padang Panjang.

STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

2.1 Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota dan bertanggungjawab kepada Walikota. Sekretariat Daerah Kota membantu Walikota untuk penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

- 1) Pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- 2) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Organisasi Perangkat Daerah;
- 3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
- 4) Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD Kota merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kota, Sekretariat DPRD Kota dipimpin oleh Sekretaris DPRD Kota yang dalam melaksanakan tugas secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD Kota dan secara administratif bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh dengan Keputusan Walikota atas persetujuan pimpinan DPRD Kota setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi. Sekretariat DPRD Kota mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota, serta diperlukan oleh DPRD Kota dalam melaksanakan hak dan fungsinya dengan

kebutuhan, Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD Kota;
- 2) Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD Kota;
- 3) Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD Kota; dan
- 4) Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kota.

2.3 Inspektorat

Inspektorat Kota merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dipimpin oleh Inspektur, Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat Daerah Kota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Inspektorat Daerah kota dalam melaksanakan tugas menyelenggaraan fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan;
- 2) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.
- 3) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota;
- 4) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- 5) Pelaksanaan administrasi Inspektorat Kota; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.4 Dinas Daerah

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas Daerah Kota yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota. Dinas Daerah Kota mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota. Dinas Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 2) Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Dinas Daerah Kota Padang Panjang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan urusan pemerintah bidang Kebudayaan.
- 2) Dinas Kesehatan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Kesehatan;
- 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan urusan pemerintahan bidang Pertanahan;
- 4) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
- 5) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kententeraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
- 6) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial, urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- 7) Dinas Perhubungan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
- 8) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 9) Dinas Komunikasi dan Dinas Informatika Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik, dan urusan pemerintahan bidang Persandian;
- 10) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja;
- 11) Dinas Pariwisata Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
- 12) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C, menyelenggarakan urusan bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang Kearsipan;
- 13) Dinas Pangan dan Pertanian Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan, urusan pemerintahan bidang Pertanian, urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan; dan
- 14) Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan Perdagangan, urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan urusan pemerintahan bidang Perindustrian.

2.5 Badan Daerah Kota

Badan Daerah Kota merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi wewenang Daerah Kota. Badan Daerah Kota dipimpin oleh Kepala Badan Daerah Kota yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota. Badan Daerah Kota mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.

- 1) Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

- 3) Pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Badan Daerah Kota Padang Panjang berdasarkan Perda Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
- 2) Badan Pengelola Keuangan Daerah Tipe C, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan; dan
- 3) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

2.6 Kecamatan

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota. Camat mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- 2) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- 4) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota;
- 5) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

- 6) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- 7) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- 8) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintahan Daerah Kota yang ada di Kecamatan; dan
- 9) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan Walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota. Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Perangkat Kecamatan.

Adapun Kecamatan yang ada di lingkungan : Pemerintah Kota Padang Panjang berdasarkan Perda Kota Padang Panjang berdasarkan Perda Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Kecamatan Padang Panjang Timur Tipe B,
- 2) Kecamatan Padang Panjang Barat Tipe B.

Adapun Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Walikota Padang Panjang sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah diatur dengan Perwako No. 13 Tahun 2019
2. Sekretariat DPRD diatur dengan Perwako No. 14 Tahun 2019
3. Inspektorat diatur dengan Perwako No. 15 Tahun 2019
4. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga diatur dengan Perwako No. 32 Tahun 2016
5. Dinas Kesehatan diatur dengan Perwako No. 16 Tahun 2019
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diatur dengan Perwako No. 17 Tahun 2019
7. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup diatur dengan Perwako No. 18 Tahun 2019
8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran diatur dengan Perwako No. 19 Tahun 2019

9. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diatur dengan Perwako No. 20 Tahun 2019
10. Dinas Perhubungan diatur dengan Perwako No. 21 Tahun 2019
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diatur dengan Perwako No. 22 Tahun 2019
12. Dinas Komunikasi dan Informatika diatur dengan Perwako No. 23 Tahun 2019
13. Dinas Penanaman Modal dan PTSP diatur dengan Perwako No. 24 Tahun 2019
14. Dinas Pariwisata diatur dengan Perwako No. 25 Tahun 2019
15. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan diatur dengan Perwako No. 26 Tahun 2019
16. Dinas Pangan dan Pertanian diatur dengan Perwako No. 27 Tahun 2019
17. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah diatur dengan Perwako No. 28 Tahun 2019
18. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah diatur dengan Perwako No. 29 Tahun 2019
19. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Perwako No. 30 Tahun 2019
20. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM diatur dengan Perwako No. 31 Tahun 2019
21. Kecamatan Padang Panjang Barat diatur dengan Perwako No. 49/2016
22. Kecamatan Padang Panjang Timur diatur dengan Perwako No. 49/2016
23. BPBD dan Kesbangpol diatur dengan Perwako No. 49 Tahun 2010
24. Rumah Sakit Umum Daerah diatur dengan Perwako No.41 Tahun 2010



RENCANA STRATEGIK

Rencana strategik merupakan alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini, untuk melakukan proyeksi kondisi masa datang dengan memanfaatkan segenap potensi sumber daya yang ada. Untuk instansi pemerintah, rencana strategik tersebut memuat antara lain visi, misi, tujuan, sasaran, strategi kebijakan dan program serta ukuran capaian dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, Perencanaan strategik tersebut secara umum mengandung makna suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun sampai 10 (sepuluh) tahun ke depan, yang disusun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan kekuatan, potensi, peluang dan tantangan yang ada atau yang mungkin timbul.

Sebagai organisasi publik, Pemerintah Kota Padang Panjang perlu menyusun dan menetapkan rencana strategik. Ini menjadi penting karena dengan adanya Rencana Strategik tersebut, akan dapat diketahui sejauh mana kinerja yang telah berhasil dicapai dan apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Rencana strategik tersebut adalah berupa RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 serta Renstra OPD. Beberapa variabel rencana strategik yang dikemukakan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Kota Padang Panjang Tahun 2019 ini mengacu kepada RPJMD Kota Padang Panjang tahun 2018-2023. Variabel strategik tersebut antara lain sebagai berikut:

3.1 Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan tentang apa yang akan dicapai oleh suatu organisasi atau lembaga. Adapun rumusan visi Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut ” **UNTUK KEJAYAAN PADANG PANJANG YANG BERMARWAH DAN BERMARTABAT**”.

Dari Visi Kota Padang Panjang yang telah disepakati tersebut, ada beberapa hal pokok dan makna yang perlu dipahami yaitu antara lain:

- 1) **Untuk Kejayaan Padang Panjang**, artinya menciptakan kondisi atau keadaan yang mantap, mapan, lebih menguntungkan, lebih berkemaslahatan, lebih membahagiakan dan semakin bermakna bagi seluruh warga Padang Panjang Kota Serambi Mekkah yang berfalsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.
Kejayaan Padang Panjang berarti sebuah hasil dari proses perubahan yang menggambarkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Kejayaan Padang Panjang ditandai dengan Tingkat Perekonomian yang tinggi, kualitas SDM yang baik dan reformasi birokrasi yang berjalan baik.
- 2) **Bermarwah**, adalah istilah yang menunjuk pada kehormatan diri, yang memiliki arti kemuliaan dan kewibawaan. Sehingga dengan visi 'Menjadikan Kota Padang Panjang sebagai Kota Bermarwah' diharapkan dapat terwujud suatu kondisi kemuliaan bagi Kota Padang Panjang dan seluruh masyarakatnya. Bermarwah berkaitan dengan SDM yang berkualitas, masyarakat yang agamis, religi dan berbudaya.
- 3) **Bermartabat**, Kota yang bermartabat dapat diwujudkan melalui Kota yang aman, tertib, bersih dan asri, dimana masyarakat Kota Padang Panjang adalah masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera dan memiliki keunggulan-keunggulan dan berdaya siang tinggi untuk dapat menempatkan diri sebagai kota yang peduli lingkungan, meningkatnya kesejahteraan masyarakat, meningkatnya partisipasi masyarakat dan terlaksananya reformasi birokrasi.

3.2 Misi

Dalam upaya mengoperasionalkan Visi 'Untuk Kejayaan Padang Panjang Yang Bermarwah dan Bermartabat' dengan memperhatikan perubahan paradigma pembangunan Nasional, Provinsi dan isu-isu strategis serta kondisi yang akan dihadapi Kota Padang Panjang pada masa yang akan datang maka dirumuskan empat pilar pembangunan Kota Padang Panjang sebagai berikut :

1) EKONOMI

Untuk mewujudkan pilar ekonomi ini melalui beberapa program dan kegiatan strategis antara lain Rumah Wirausaha, Bedah warung, SATIMISAKE (Rp 1 Milyar sampai Rp 3 Milyar per kelurahan) untuk percepatan dan pemerataan pembangunan sarana dan prasarana serta

pemberdayaan masyarakat di seluruh kelurahan di Kota Padang Panjang, Koperasi syariah, smart warung.

Di bidang infrastruktur juga direncanakan beberapa kegiatan strategis antara lain pembangunan gedung parkir, penataan pedestrian pasar dan wisata kuliner, revitalisasi *rest area*, pelebaran jalan St.Syahrir, melengkapi sarana prasarana pasar, smart transportasi, rehab rumah tak layak huni, dan pembangunan infrastruktur lainnya untuk meningkatkan kualitas infrastruktur berkelanjutan.

2) PENDIDIKAN, SOSIAL DAN KEAGAMAAN

Selanjutnya untuk mewujudkan pilar pendidikan, sosial, keagamaan pada bidang pendidikan diprioritaskan pada beberapa program dan kegiatan strategis antara lain Guru dan Murid Para Juara, yaitu peningkatan kualitas dan kompetensi guru, program *reward* guru dan siswa berprestasi, *Smart Teacher* dan *Smart Student*, Beasiswa bagi siswa miskin dan berprestasi, revitalisasi bangunan sekolah sehingga nantinya seluruh sekolah di kota Padang Panjang memiliki standar yang sama baik itu pustaka, mushalla, kantin dan toilet sekolah. Diharapkan dengan berbagai kegiatan strategis di bidang pendidikan seluruh sekolah di Padang Panjang akan menjadi sekolah unggul dan terdepan. Kegiatan strategis lainnya untuk mendukung misi kedua adalah wisata rakyat dan pacu kudo, serta pembangunan *Learning Knowledge Center* dan museum digital, melanjutkan pembangunan kawasan Islamic Center dan *convention hall*.

Tak kalah pentingnya adalah pembangunan bidang sosial keagamaan melalui beberapa program dan kegiatan strategis antara lain Padang Panjang sayang disabilitas dan lansia dengan memberi pelayanan dan penghormatan kepada disabilitas dan lanjut usia, melalui penyediaan layanan khusus di bidang kesehatan, sosial dan keluarga serta kegiatan lansia bermakna. Disamping itu juga ada program Gelora Serambi Mekkah melalui beberapa kegiatan antara lain pejuang Subuh dan Shubuh Mubarakah, Magrib Mengaji, Smart Surau, Kampung Tahfidz dan Muzakarah Ulama.

3) KESEHATAN

Pembangunan pilar kesehatan diprioritaskan pada beberapa kegiatan strategis antara lain Dokter Warga, merupakan pelayanan langsung dokter kepada masyarakat di tingkat kelurahan, program Waliy Siaga (siaga melindungi) melalui pelayanan kesehatan darurat (PSC 119), program pendamping pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin serta Padang Panjang bergoro. Untuk mendukung misi kesehatan juga disukung dengan sarana prasarana olahraga sehingga direncanakan pembangunan *sports centre*.

4) PELAYANAN UMUM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN

Selanjutnya untuk mewujudkan pilar pelayanan umum dan partisipasi masyarakat melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang responsive, inovatif dan paertisipatif ada beberapa program dan kegiatan strategis yang di rencanakan antara lain program *e-governance* dengan kegiatan *command centre* dan program zona integritas dan gratifikasi dengan kegiatan pencegahan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme. Diharapkan melalui program ini nantinya dapat terwujud Padang Panjang Smart City, Kota Cerdas dan Berintegritas.

Pada pilar ini juga perlu ditingkatkan partisipasi sosial dan pemberdayaan masyarakat dengan semangat dan sinergi peran serta berbagai kelompok sosial kemasyarakatan, masyarakat adat, pemuda dan kaum perempuan serta pemanfaatan nilai kearifan lokal dan kegotong-royongan, termasuk dalam pembangunan kota.

Mengingat bahwa dalam dokumen visi dan misi Kepala Daerah, empat pilar tersebut di jadikan sebagai pokok misi, kemudian pokok- pokok misi tersebut di uraikan dalam kalimat misi dalam penyajian dokumen RPJMD Kota Padang Panjang, sebagai berikut:

Tabel 1

**Pilar Pembangunan/Pokok Misi dan Kalimat Misi
Kota Padang Panjang Tahun 2018- 2023**

No	Pilar/ Pokok Misi	Kalimat Misi Pembangunan Daerah
1	EKONOMI	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Unggulan Daerah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan
2	PENDIDIKAN, SOSIAL DAN KEAGAMAAN	Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas Daya Saing SDM Masyarakat yang Berakhlak dan Berbudaya
3	KESEHATAN	
4	PELAYANAN UMUM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Inovatif dan Partisipatif

Untuk mencapai visi di lakukan melalui beberapa misi pembangunan, berikut keterkaitan visi dan misi pembangunan Kota Padang Panjang.

Misi 1 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Unggulan Daerah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kemampuan perekonomian daerah dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang berbasis pada potensi ekonomi lokal, berorientasi pada ekonomi kerakyatan yang menggunakan pendekatan pemanfaatan potensi unggulan daerah dalam menggerakkan perekonomian daerah dalam rangka menciptakan pembangunan ekonomi secara merata sehingga dapat menemukan momentumnya di tengah arus ekonomi global.

Misi 2 : Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas daya Saing SDM Masyarakat yang Berakhlak dan Berbudaya.

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi.

Misi 3 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Inovatif dan Partisipatif

Penyelenggaraan pemerintahan diprioritaskan pada peningkatan penyelenggaraan teknis pemerintahan yang berdasarkan prinsip akuntabilitas, terkontrol, responsif, profesional, efisien dan efektif, transparan, visioner dan partisipatif serta supremasi hukum dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

3.3 Tujuan dan Sasaran

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Padang Panjang ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin di capai di masa datang. Untuk itu, tujuan dan sasaran hendaknya merupakan arsitektur kinerja tertinggi atau impact dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. Untuk itu, impact tersebut harus memberi pengertian sebagai *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan kota padang panjang.

Dalam perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Padang Panjang, perlu dibangun suatu kerangka pembangunan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah terpilih. Kerangka pembangunan strategis tersebut akan memberikan gambaran yang jelas mengenai rumusan tujuan dan sasaran pembangunan melalui pengelompokan pilar/misi pembangunan jangka menengah Kota Padang Panjang 2018-2023. Pengelompokan pilar/ misi pembangunan telah disusun menjadi 4(empat) Komponen yakni terkait dengan Ekonomi, Pendidikan, Sosial dan

Keagamaan, Kesehatan serta pelayanan Umum dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan. Keempat Komponen tersebut inilah kemudian di kelompokkan ke dalam 3 (tiga) kalimat misi yang nantinya akan membentuk rumusan tujuan pembangunan dengan gambaran sebagai berikut :

Tabel 2.
Hubungan Komponen Pilar/Misi Dengan Tujuan Pembangunan
Kota Padang Panjang Tahun 2018- 2023

No.	Pilar/ Pokok Misi	Tagline	Kalimat Misi Pembangunan Daerah	Tujuan	Indikator Tujuan
1	EKONOMI	Padang Panjang Assalam	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Unggulan Berbasis Pembangunan Berkelanjutan	Meningkatnya perekonomian daerah yang berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi
				Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	PDRB Perkapita
2	PENDIDIKAN, SOSIAL DAN KEAGAMAAN	Padang Panjang Fathonah	Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas daya Saing SDM Masyarakat yang Berakhlak dan Berbudaya	Meningkatnya pemerataan dan kualitas daya saing SDM yang sehat, berakhlak dan unggul	Indeks Pembangunan Manusia
3	KESEHATAN	Padang Panjang Sehat		Terwujudnya tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis	Tingkat Penyelesaian pelanggaran

4	PELAYANAN UMUM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN	Padang Panjang Melayani	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang responsif Inovatif dan Partisipatif	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Indeks Reformasi Birokrasi
				Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Persentase partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Keberhasilan tujuan pembangunan Kota Padang Panjang dilihat dari kondisi akhir perencanaan pada tiap-tiap capaian indikator tujuan. Keberhasilan pencapaian visi pembangunan Kota Padang Panjang. Berikut keterkaitan visi dan tujuan pembangunan Kota Padang Panjang tahun 2018-2023 :

Tabel 3
Visi, Tujuan dan Target

VISI: UNTUK KEJAYAAN PADANG PANJANG BERMARWAH DAN BERMARTABAT				
No	Tujuan	Indikator Tujuan	Kondisi Awal (2017)	Target Akhir (2023)
1	Meningkatnya perekonomian daerah yang berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi(%)	5,81	6,30
2	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	PDRB Perkapita (Rp. juta)	44.12	58,05
3	Meningkatnya pemerataan dan kualitas daya saing sdm yang sehat, berakhlak dan unggul	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	77,01	80,72
4	Terwujudnya tata kelola	Tingkat penyelesaian	95.16	100

	pemerintah yang baik dan bersih	Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman, Keamanan (%)		
5	Meningkatnya tata kelola pemerintah yang baik dan bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	54,94	70
6	Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Persentase Partisipasi masyarakat dalam pembangunan (%)	2,29	2,34

Berdasarkan tujuan sebagai representasi visi dan misi pembangunan jangka menengah di atas, maka ditetapkan sasaran pembangunan pada masing-masing tujuan, sebagai berikut:

1) **Meningkatnya perekonomian daerah yang berkelanjutan**

Pengembangan ekonomi daerah yang berbasis potensi unggulan daerah merupakan pengembangan ekonomi yang menggunakan pendekatan pemanfaatan potensi unggulan daerah dalam menggerakkan perekonomian daerah dalam rangka menciptakan pembangunan ekonomi secara merata sehingga dapat menemukan momentumnya ditengah arus ekonomi global. Peningkatan daya saing ekonomi juga tidak lepas dari pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan, selaras dengan kemajuan aktifitas rakyat dalam menghasilkan produk-produk unggulan daerah di bidang pertanian, peternakan, industri, perdagangan dan berbagai karya lokal sesuai potensi yang ada.

Kota Padang Panjang sebuah kota kecil yang relatif tidak memiliki potensi sumber daya alam, namun dengan posisi strategis sebagai kota persinggahan, Pemerintah Kota Padang Panjang menitikberatkan sektor perdagangan dan jasa dalam meningkatkan pendapatan perkapitanya. Pemerintah Kota Padang Panjang sudah sejak lama mempersiapkan diri untuk dapat menjadi salah satu pusat industri kulit di wilayah Sumatera dan pusat pengolahan susu dalam mendorong meningkatkan perekonomian masyarakatnya. Selain perdagangan dan jasa, sektor pariwisata juga menjadi salah satu potensi daerah. Di Kota Padang Panjang terdapat Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau (PDIKM) yang menyediakan berbagai informasi dan dokumentasi tentang sejarah dan budaya Minangkabau baik berupa buku-buku, microfilm, foto dan sebagainya.

Selain itu juga terdapat kawasan rekreasi keluarga yaitu Mifan yang terdiri dari taman air dengan wahana kolam ombak, kolam arus, kolam berenang khusus wanita, kolam berenang khusus anak-anak, ember tumpah dan slidetower. Kota Padang Panjang juga terkenal dengan wisata religinya dengan mesjid Asasi Sigando dan Islamic Center, dan juga yang tak kalah menariknya adalah wisata pendidikan dengan Diniyyah Puteri, Thawalib, Pesantren Serambi Mekkah dan pesantren lainnya yang memang sudah sangat terkenal dari dulunya dalam hal Pendidikan Islam.

Guna mewujudkan tujuan meningkatnya perekonomian daerah yang berkelanjutan, maka sasaran pembangunan yang hendak di capai adalah:

- a. Meningkatkan daya saing ekonomi unggulan daerah yang tangguh berbasis ekonomi kerakyatan.

Peningkatan perekonomian berbasis kerakyatan terbukti cukup tanggung dalam menghadapi krisis ekonomi. Pembangunan ekonomi ke depan di harapkan menitikberatkan pada pengembangan ekonomi-ekonomi yang melibatkan pelaku ekonomi secara masif terutama masyarakat lokal. sehingga masyarakat tidak hanya menjadi obyek pembangunan tetapi juga sebagai subyek pembangunan di Kota Padang Panjang. Sektor perdagangan perlu dikembangkan sebagai wujud implementasi ekonomi kerakyatan. Keberhasilan Kota Padang Panjang dalam meningkatnya perekonomian daerah yang tangguh berbasis ekonomi kerakyatan dapat dilihat dari pencapaian laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 3,56%; laju pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 5,92%; laju pertumbuhan ekonomi sektor industri sebesar 2,46%; laju pertumbuhan ekonomi sektor penyedia akomodasi dan makan minum sebesar 7,86%.

- b. Meningkatnya kualitas infrastruktur berkelanjutan

Pembangunan infrastruktur kerap dikaitkan dengan faktor utama (penggerak) pertumbuhan ekonomi. Terwujudnya infrastruktur yang merata (sarana dan prasarana) bertujuan agar seluruh wilayah Kota Padang Panjang dapat terakses secara lancar, baik terhadap sumber-sumber ekonomi produktif maupun sosial lainnya. Selain itu pembangunan infrastruktur juga harus memperhatikan dampak terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan. Keberhasilan pada sasaran dapat dilihat pada presentase kenaikan Indeks

Kualitas Layanan Infrastruktu sebesar 1,5% dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 66,33- 67,65 pada tahun 2023.

2) Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Salah satu aspek kesejahteraan masyarakat adalah mutu tenaga kerja. Mutu tenaga kerja yang baik/tinggi akan memberikan peluang kepada peningkatan produktifitas sehingga akan mempengaruhi capaian pembangunan ekonomi daerah. Peningkatan produktifitas ini pada akhirnya akan menjadi faktor pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat yang akan berimbas pada peningkatan mutu kehidupan masyarakat yang pada akhirnya masyarakat dapat hidup secara mandiri dengan pendapatan yang semakin meningkat.

Peningkatan kemandirian masyarakat dapat diwujudkan oleh pemerintah daerah dengan program-program pembangunan daerah untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran, serta program pembangunan daerah dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Sampai saat ini, kemiskinan dan pengangguran adalah dua kata yang berhubungan langsung dengan masalah pembangunan. Untuk meningkatkan kemandirian masyarakat, pemerintah daerah harus bekerja sama dan menstimulasi masyarakat agar terdorong dan ikut berpartisipasi dalam mewujudkannya.

Peningkatan produktifitas dan pendapatan masyarakat Kota Padang Panjang dapat dicapai melalui beberapa sektor seperti sektor industri (termasuk industri kecil dan menengah), jasa, dan pertanian. Saat ini sektor pariwisata merupakan salah satu sektor primadona dalam menghasilkan devisa negara. Selain itu, Pemerintah harus berusaha meningkatkan investasi sebanyak-banyaknya terutama sektor yang padat karya dengan tujuan meningkatkan dan pemerataan pendapatan masyarakat.

Tujuan pembangunan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dicapai melalui sasaran sebagai berikut :

a. Menurunnya Angka Kemiskinan

Kemiskinan menjadi fenomena yang perlu di atasi segera agar kesejahteraan masyarakat terwujud. Upaya untuk memperdayakan masyarakat miskin perlu di lakukan agar masyarakat miskin memiliki kesempatan untuk keluar dari garis kemiskinan, sejahtera, dan bisa terus menjaga perekonomiannya menjadi stabil agar tidak kembali dalam lingkaran kemiskinan. Berbagai program

penanggulangan dilakukan untuk upaya pemberantasan kemiskinan ini antara lain juga melalui gerakan urang mudo berwira usaha, gerakan warga berdaya kota berjaya. Dengan berbagai program pemerantasan kemiskinan di harapkan kemiskinan dapat di turunkan sebesar 3,75% pada tahun 2023.

Di samping itu, ketimpangan kesejahteraan masyarakat juga merupakan faktor yang mempengaruhi kondisi kemiskinan. Pembangunan ekonomi masyarakat akan menjadi suatu keniscayaan apabila terjadi ketimpangan kesejahteraan di masyarakat. Harapannya pembangunan Kota Padang Panjang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dan bukan hanya kelompok-kelompok tertentu. Keberhasilan sasaran ini dapat di lihat dari pencapaian Indeks Gini sebesar 0,24 pada tahun 2023; dan

b. Menurunnya Tingkat Pengangguran

Salah satu penyebab banyaknya pengangguran adalah minimnya lapangan pekerjaan dan kurangnya keahlian dari pencari kerja, termasuk pencari kerja terdidik. Untuk mengatasi tingginya angka pengangguran di Kota Padang Panjang tentunya perlu program untuk mengatasi masalah pengangguran diantaranya melalui gerakan urang mudo kreatif berwirausaha yang nantinya akan mendorong kegiatan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Keberhasilan sasaran ini dapat di lihat dari tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,34% pada tahun 2023.

c. Meningkatnya Pendapatan Masyarakat

Peningkatan pendapatan masyarakat merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat melalui adanya peningkatan daya beli keluarga untuk membiayai kebutuhan sehari-hari keluarga baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan sosial. Pendapatan masyarakat secara nyata berhubungan erat dengan pemenuhan kebutuhan hidup. Dengan berbagai program yang ada terutama dalam pengembangan kewirausahaan untuk peningkatan pendapatan masyarakat diharapkan daya beli masyarakat meningkat sebesar 10,39 ribu rupiah tahun 2023;

3) **Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berakhlak dan Unggul**

Kualitas sumber daya manusia terutama pendidikan memegang peranan kunci dalam penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga sangat menentukan berhasil atau gagalnya pembangunan yang dilakukan pada suatu daerah. Dalam pencapaian pendidikan, salah satu fokus Pendidikan di Kota Padang Panjang adalah dengan gerakan literasi Padang Panjang bergerak yakni memberikan dukungan fasilitas pembangunan gerakan anak dan remaja gemar membaca, beraktifitas dan mengembangkan potensi bakat serta hobinya dalam rangka generasi masa depan Kota Padang Panjang yang lebih berkarakter dan mandiri agar masyarakat Kota Padang Panjang mampu mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu bersaing secara nasional bahkan internasional.

Disamping terus meningkatkan kualitas pendidikan, kualitas kesehatan juga perlu menjadi perhatian semua pihak dengan mengarahkan pada mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan tagline Padang Panjang Sehat. Selain pendidikan dan kesehatan dalam peningkatan kualitas SDM masyarakat, pembangunan karakter masyarakat juga perlu di lakukan melalui pengamalan nilai-nilai agama dan budaya Minangkabau dalam aktivitas masyarakat.

Guna mewujudkan tujuan Meningkatkan Pemerataan dan kualitas daya saing SDM yang sehat, berakhlak dan unggul, maka sasaran pembangunan yang akan di capai adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan pemerataan kualitas daya saing pendidikan.

Pembangunan kualitas pendidikan tidak hanya fokus pada prestasi siswa, peningkatan karakter juga menjadi salah satu point penting dalam menghadapi persaingan global. Keberhasilan pencapaian sasaran ini dilihat dari pencapaian rata-rata lama sekolah sebesar 12,78; dan harapan lama sekolah sebesar 15,74 pada tahun 2023;

b. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Pembangunan kesehatan yang berlangsung komprehensif dan berkesinambungan telah berdampak terhadap meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh dan tercapainya sasaran *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Peningkatan derajat kesehatan

masyarakat ditandai dengan bertambahnya angka harapan hidup, dan diperkirakan menjadi sebesar 72,49 tahun pada tahun 2023;

4) Terwujudnya tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis.

Tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis tentunya ditandai dengan berkurangnya pelanggaran-pelanggaran terkait penyakit masyarakat yang saat ini tengah merajalela dalam kehidupan masyarakat, yang akan berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat yang tentunya juga berpengaruh terhadap ketentraman dalam kehidupan masyarakat, permasalahan sosial dan permasalahan penyakit masyarakat ini tentunya tidak lepas dari norma dan nilai agama yang berkembang dimasyarakat. Dengan semakin meningkatnya penerapan norma dan nilai agama dalam masyarakat akan semakin tentram kehidupan sosial masyarakat.

Guna mewujudkan tujuan terwujudnya tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis maka sasaran pembangunan yang akan di capai antara lain:

a. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum.

Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan suatu kondisi yang harus di ciptakan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat sehingga kehidupan bermasyarakat dapat berjalan dengan harmonis dan pelaksanaan berlangsung dengan lancar. Ketentraman dan ketertiban umum di tandi salah satunya dengan berkurangnya pelanggaran-pelanggaran terkait penyakit masyarakat yang saat ini tengah meraja lela dalam kehidupan masyarakat, yang akan berpengaruh dalam kehidupan sosial masyarakat yang tentunya juga berpengaruh terhadap ketentraman dalam kehidupan masyarakat. Keberhasilan pencapaian sasaran ini dilihat dari pencapaian tingkat penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban.

b. Menurunnya masalah kesejahteraan sosial.

Pelayanan sosial merupakan salah satu urusan wajib dasar yang harus di selenggarakan oleh pemerintah daerah, selain terkait pelayanan sosial aktivitas keagamaan juga menjadi salah satu prioritas pemerintahan periode ini untuk membangun nilai-nilai keagamaan didalam masyarakat. Keberhasilan pencapaian sasaran ini dilihat dari pencapaian Persentase Penurunan Jumlah PMKS sebesar 1,13 persen tahun 2023.

c. Meningkatnya aktivitas keagamaan di masyarakat.

Kota Padang Panjang yang sudah sangat terkenal dengan julukan Kota Serambi Mekkah merupakan sebuah kota yang dalam kehidupan sehari-hari diwarnai dengan nuansa islami, yang tercermin dari kehidupan bermasyarakat yang diwarnai dengan Syariah Islam. Guna mempertahankan julukan ini maka perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan pengamalan ajaran agama islam dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan meningkatnya aktivitas keagamaan di masyarakat diharapkan akan terwujud tatanan kehidupan social masyarakat yang tentram dan agamis. Sasaran ini diharapkan meningkat sebesar 100 persen pada tahun 2023.

5) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Kinerja birokrasi pemerintahan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah tanpa adanya dukungan tata kelola yang baik, target-target pembangunan tidak mungkin dapat dicapai dengan baik. Penguatan birokrasi pemerintahan ditujukan untuk menghapus citra buruk atas kondisi tata kelola pemerintahan secara umum di Indonesia khususnya di Kota Padang Panjang. Hal ini tersebut sekaligus dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Perbaikan tata kelola pemerintahan dilakukan dengan peningkatan penyelenggaraan teknis pemerintah yang berdasarkan prinsip akuntabilitas, terkontrol, responsif, profesional, efisien dan efektif, transparan, visioner dan partisipatif serta supremasi hukum. Perbaikan birokrasi dilakukan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN yang dimulai dengan perbaikan kualitas pengelolaan keuangan daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Berdasarkan uraian di atas, sasaran pembangunan ini adalah:

a. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah

Kinerja aparatur yang baik merupakan salah satu ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah, semakin baik kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) semakin baik juga penyelenggaraan pemerintahannya. Keberhasilan sasaran ini dapat dilihat dari pencapaian predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dengan nilai 80,02 (A) pada tahun 2023; dan pada tujuan ini juga dicapai dengan sasaran meningkatnya kualitas

pengelolaan keuangan daerah. Kualitas pengelolaan keuangan daerah yang baik akan menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam pembangunan. Pencapaian pembangunan dapat berhasil dimulai dari pengelolaan keuangan daerah yang baik dan akuntabel. Semakin baik pengelolaan keuangan daerah dan semakin sedikit kebocoran anggaran akan semakin banyak pembangunan-pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh masyarakat. Keberhasilan kinerja sasaran ini dilihat dari pencapaian opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2023; dan

b. Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas dan melayani.

Salah satu tugas utama Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Masyarakat saat ini mendambakan aparatur yang melayani, keberhasilan terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas ditandai dengan tidak adanya keluhan pelayanan publik oleh masyarakat, hal ini dapat dilihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) meningkat dengan nilai 82 (baik) pada tahun 2023.

6) Meningkatkan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan

Pelibatan masyarakat dalam pembangunan menjadi suatu keharusan. Masyarakat harus menjadi subjek pembangunan dan tidak hanya menjadi objek pembangunan saja. Peran masyarakat dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah menjadi suatu keharusan. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, masyarakat berhak berpartisipasi dalam penyusunan peraturan daerah dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani masyarakat.

Pembangunan daerah selain menuntut peran aktif masyarakat juga harus memberdayakan masyarakat tanpa memihak suatu golongan tertentu. Meningkatkan partisipasi sosial dan pemberdayaan masyarakat dengan semangat dan sinergi peran serta berbagai kelompok sosial kemasyarakatan, masyarakat adat, pemuda dan kaum perempuan serta pemanfaatan nilai kearifan lokal dan kegotongroyongan. Berdasarkan uraian di atas keberhasilan tujuan meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan dapat dicapai melalui sasaran;

- a. Meningkatnya peran serta kelompok lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah melibatkan segenap unsur masyarakat dalam penentuan kebijakan-kebijakan pemerintah, harapannya masyarakat sebagai penerima manfaat pembangunan dapat menenukan mana yang sesuai dengan kondisi dan keadaan yang nyata dibutuhkan. Keberhasilan sasaran ini ditandai dengan pencapaian Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif sebesar 90 persen pada tahun 2023.

- b. Meningkatnya pemberdayaan perempuan

Pembangunan dewasa ini harus memperhatikan kesetaraan gender, bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan dalam melakukan berbagai aktivitas Pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial. Keberhasilan sasaran ini ditandai dengan pencapaian Indeks Pemberdayaan Perempuan (IDG) sebesar 83,10 pada tahun 2023; dan

Berikut ini di sajikan keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran serta target keberhasilan pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023:

**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2019**

NO	VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
VISI : UNTUK KEJAYAAN PADANG PANJANG YANG BERMARWAH DAN BERMARTABAT			
I	MISI 1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Unggulan Daerah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan"		
T1.	Meningkatnya Perekonomian Daerah Yang Berkelanjutan	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi	5.96
	S1. Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Unggulan Daerah Yang Tangguh dan Berbasis Ekonomi Kerakyatan	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran 3. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri 4. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,05 5,02 2,28 7,61
	S2. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan	5. Persentase Kenaikan Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur 6. IKLH	0,50 65,25-66,57
T2.	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	2. PDRB Perkapita	48,19
	S3. Menurunnya Angka Kemiskinan	7. Angka Kemiskinan 8. Indeks Gini	5,45 0,28
	S4. Menurunnya Angka Pengangguran	9. Tingkat Pengangguran Terbuka	4,84
	S5. Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	10. Pengeluaran Perkapita (Daya Beli Masyarakat)	10,29
II.	MISI 2 Meningkatkan Pemerataan Kualitas Daya Saing SDM Masyarakat Yang Berakhlak dan Berbudaya		
T3.	Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Daya Saing SDM yang sehat, berakhlak dan unggul	3. Indeks Pembangunan Manusia	78.25
	S6. Meningkatnya Pemerataan Kualitas Daya Saing Pendidikan	11. Rata-rata Lama Sekolah 12. Harapan Lama Sekolah	11.88 15,27
	S7. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	13. Angka Harapan Hidup	72.47

T4.	Terwujudnya tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis	4.	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum	96.37
	S8. Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	14	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum	96.37
	S9. Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	15	Persentase Penurunan Jumlah PMKS	2.34
	S10. Meningkatnya Aktivitas Keagamaan di Masyarakat	16.	Persentase aktivitas kegiatan keagamaan di mesjid	38.82
III.	MISI 3 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Responsif, Inovatif dan Partisipatif			
T5.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	5.	Indeks Reformasi Birokrasi	62
	S11. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	17.	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	B (60,1)
		18.	Opini BPK	WTP
	S12. Terselenggaranya Pelayanan Publik	19.	Indeks Kepuasan Masyarakat	78 (Baik)
T6.	Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan	6.	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	70
	S13. Meningkatnya Peran Serta Kelompok /Lembaga Kemasyarakatan Dalam Pembangunan	20.	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	70
	S14. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	21.	Indeks Pemberdayaan Gender	77.50

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Secara konseptual Perjanjian Kinerja Perubahan dapat dipandang sebagai suatu kontrak kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasannya yang menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan. Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2019 merupakan dokumen pernyataan Perjanjian Kinerja Perubahan Walikota Padang Panjang dan antara Walikota Padang Panjang sebagai atasan dengan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan dengan alokasi anggarannya telah disediakan dalam APBD Perubahan Pemerintahan Kota Padang Panjang Tahun 2019.

Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2019 dan Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Padang Panjang akan dijadikan acuan dalam mengukur pencapaian kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah baik tingkat OPD maupun tingkat Pemerintah kota.

Sekaitan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran, maka disusunlah Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kota Padang Panjang yang terdiri dari Pernyataan Perjanjian Kinerja Perubahan Kota dan Pernyataan Perjanjian Kinerja Perubahan OPD berikut dengan Lampiran Perjanjian Kinerja Perubahan yang terdiri dari :

- A. Pernyataan Perjanjian Kinerja Perubahan Kota Dan Perjanjian Kinerja Perubahan OPD
- B. Perjanjian Kinerja Perubahan OPD
 - 1. Sekretariat Daerah
 - 2. Sekretariat DPRD
 - 3. Inspektorat Daerah

4. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
5. Dinas Kesehatan
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
8. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9. Dinas Perhubungan
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11. Dinas Komunikasi dan Informatika
12. Dinas Penanaman Modal dan PTSP
13. Dinas Pariwisata
14. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
15. Dinas Pangan dan Pertanian
16. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
17. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
18. Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
19. Badan Pengelola Keuangan Daerah
20. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
21. Kecamatan Padang Panjang Barat
22. Kecamatan Padang Panjang Timur
23. BPBD dan Kesbangpol
24. RSUD

Selanjutnya dimuat dalam Lampiran Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kota Padang Panjang tahun 2019 ini

PENUTUP

Perjanjian Kinerja Perubahan Kota Padang Panjang Tahun 2019, merupakan tekad dan janji Pemerintah Kota Padang Panjang sekaligus tekad dan janji kepala OPD untuk pencapaian rencana kinerja perubahan tahunan dalam rangka memenuhi amanat perundang-undangan. Perjanjian Kinerja Perubahan ini adalah bagian dari upaya nyata untuk memerangi korupsi dengan melakukan perubahan mendasar terhadap manajemen pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2014 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Dalam Perjanjian Kinerja Perubahan ini dilakukan penyesuaian-penyesuaian baik dari aspek dokumen perencanaan yakni RPJMD Kota Padang Panjang tahun 2018-2023 maupun dari program dan kegiatan pada OPD sesuai dengan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2019.

Perjanjian Kinerja Kota Padang Panjang Tahun 2019 diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang berbagai rencana capaian kinerja dari seluruh OPD yang ada. Selain itu, juga bagian dari transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kota Padang Panjang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) maupun pemerintahan yang bersih (*Clean Governance*)

Dengan ditandatanganinya Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2019 ini, berarti Pemerintah Kota Padang Panjang telah dapat memenuhi salah satu kewajiban akuntabilitas yang merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansii Pemerintah



WALIKOTA PADANG PANJANG

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FADLY AMRAN, BBA
Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Padang Panjang, 25 November 2019

WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN, BBA



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019		OPD PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA
			Sebelum	Sesudah	
VISI : UNTUK KEJAYAAN PADANG PANJANG YANG BERMARWAH DAN BERMARTABAT					
MISI I					
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Unggulan Daerah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan"					
T1.	Meningkatnya Perekonomian Daerah Yang Berkelanjutan	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi	5-96	5-96	Bappeda
	S1. Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Unggulan Daerah Yang Tangguh dan Berbasis Ekonomi Kerakyatan	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.05	3.05	Bappeda, Dinas Pangan Pertanian
		2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran	5.02	5.02	Bappeda Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM
		3. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri	2.28	2.28	Bappeda Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM
		4. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.61	7.61	Bappeda, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM
	S2. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan	5. Persentase Kenaikan Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	0.50	0.50	Dinas PUPR, Dinas Perkim LH, Disdagkop UMKM, Dishub, Diskominfo
		6. IKLH	65.25-66.57	65.25-66.57	Dinas Perkim LH

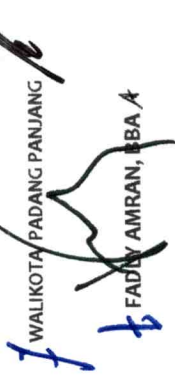
T2.	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	2.	PDRB Perkapita	48.19	48.19	Bappeda
	S3. Menurunnya Angka Kemiskinan	7.	Angka Kemiskinan	5.45	5.45	Bappeda, Dinas Sosial
	S4. Menurunnya Angka Pengangguran	8.	Indeks Gini	0.28	0.28	Bappeda
	S5. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat	9.	Tingkat Pengangguran Terbuka	4.84	4.84	Dinas Penanaman Modal PTSP
		10.	Pengeluaran Perkapita (Daya Beli Masyarakat)	10.29	10.29	Bappeda, Disdagkop UMKM
II.	MISI 2					
	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Daya Saing SDM Masyarakat Yang Berakhlak dan Berbudaya					
T3.	Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Daya Saing SDM yang sehat, berakhlak dan unggul	3.	Indeks Pembangunan Manusia	78.25	78.25	Disdikpora, Dinas Kesehatan
	S6. Meningkatkan Pemerataan Kualitas Daya Saing Pendidikan	11.	Rata-rata Lama Sekolah	11.88	11.88	Disdikpora
	S7. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	12.	Harapan Lama Sekolah	15.27	15.27	Disdikpora
		13.	Angka Harapan Hidup	72.47	72.47	Dinas Kesehatan
T4.	Terwujudnya tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis	4.	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum	96.37	96.37	Satpol PP dan Damkar
	S8. Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	14.	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum	96.37	96.37	Satpol PP dan Damkar
	S9. Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	15.	Persentase Penurunan Jumlah PMKS	2.34	2.34	Dinas Sosial PPKB PPA
	S10. Meningkatkan Aktivitas Keagamaan di Masyarakat	16.	Persentase aktivitas kegiatan keagamaan di mesjid	38.82	38.82	Setdako

III. MISI 3 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Responsif, Inovatif dan Partisipatif						
T5. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih		5.	Indeks Reformasi Birokrasi	62	62	Inspektorat Daerah, BKPSDM, Setdiako, Diskominfo
S11.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	17.	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Opini BPK	B (60,1) WTP	B (60,1) WTP	Setdiako Setdiako
S12.	Terselenggaranya Pelayanan Publik	19.	Indeks Kepuasan Masyarakat	78 (Baik)	78 (Baik)	Setdiako
T6. Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan		6.	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	70	70	Dinas Sosial PPKB PPPA, Kecamatan
S13.	Meningkatnya Peran Serta Kelompok /Lembaga Kemasyarakatan Dalam Pembangunan	20.	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	70	70	Dinas Sosial PPKBPPPA, Bappeda
S14.	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	21.	Indeks Pemberdayaan Gender	77-50	77-50	Dinas Sosial PPKBPPPA
No.		Sasaran/Program		Anggaran		Ket
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	OPD
1.	Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Unggulan Daerah yang Tangguh Berbasis Ekonomi Kerakyatan			13.316.226.100,00	13.219.846.600	
	1. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri			197.545.000	197.545.000	Disdagkop UMKM
	2. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah			1.343.544.000	1.267.382.000	Disdagkop UMKM
	3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil Menengah			467.000.000	529.490.000	Disdagkop UMKM
	4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi			734.340.000	662.884.000	Disdagkop UMKM
	5. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata			2.664.316.000	2.664.316.000	Dinas Pariwisata
	6. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata			2.385.225.000	2.494.665.000	Dinas Pariwisata
	7. Program Peningkatan Ketahanan Pangan			882.304.800	867.012.800	Dinas Pangan Pertanian
	8. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan			1.783.728.000	1.775.288.000	Dinas Pangan Pertanian
	9. Program Pengembangan Budidaya Perikanan			590.609.000	580.839.000	Dinas Pangan Pertanian
	10. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan			1.973.464.300	1.886.274.800	Dinas Pangan Pertanian
	11. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi			294.150.000	294.150.000	Dinas PMPTSP

2. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik 2. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 3. Program Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan 4. Program Penerangan Jalan Umum 5. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 6. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 7. Program Perencanaan, Penataan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 8. Program Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana 9. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Perkotaan 10. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan 11. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 	54.170.463.300,00	49.772.317.452	Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas Perhubungan Dinas PUPR Dinas PUPR BPBD Kesbangpol Dinas Perkim LH Dinas Perkim LH Dinas Perkim LH
3. Menurunnya Angka Kemiskinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Berbasis Pertanian 3. Program Bangunan Tempat Tinggal dan Pemberdayaan Komunitas Permukiman 	2.820.095.300,00	2.781.477.300	Disdagkop UMKM Dinas Pangan Pertanian Dinas Perkim LH
4. Menurunnya Angka Pengangguran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 	133.467.500	55.250.000	DPMPPTSP
5. Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengembangan Rumah Wirausaha 2. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 	646.845.000	557.845.000	Disdagkop UMKM Dinas Pangan Pertanian
6. Meningkatnya Pemerataan Kualitas Daya Saing Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Masyarakat 2. Program Padang Panjang Juara 3. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 4. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun 5. Program Pendidikan Anak Usia Dini 6. Program Pendidikan Non Formal 	61.532.553.500	47.915.088.132	Dinas Perpustakaan dan Arsip Disdikpora Disdikpora Disdikpora Disdikpora Disdikpora

7. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	95.367.560.000	95.305.143.809	Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Disdikpora RSUD Dinas Sosial PPKBPPPA RSUD
1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat	11.068.556.000	10.718.515.800	Dinas Kesehatan
2. Program Pembekalan Gizi Masyarakat	198.074.000	198.074.000	Dinas Kesehatan
3. Program Pengembangan Lingkungan Sehat	729.200.000	695.395.000	Dinas Kesehatan
4. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	303.523.000	322.570.500	Dinas Kesehatan
5. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	1.474.420.000	1.334.395.000	Disdikpora
6. Program Layanan Kesehatan Rumah Sakit	65.495.950.000	65.944.396.509	RSUD
7. Program Pengendalian Penduduk dan KB	2.601.887.000	2.704.687.000	Dinas Sosial PPKBPPPA
8. Program Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit	13.495.950.000	13.387.110.000	RSUD
8 Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.558.679.000	4.422.274.000	
1. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	4.558.679.000	4.422.274.000	Satpol PP dan Damkar
9. Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	1.605.048.500	1.387.578.500	
1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	608.583.500	415.133.500	Dinas Sosial PPKBPPPA
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	996.465.000	972.445.000	Dinas Sosial PPKBPPPA
10. Meningkatkan Aktivitas Keagamaan di Masyarakat	10.550.945.000	10.192.889.200	
1. Program Koordinasi Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Budaya dan Keagamaan	9.360.475.000	8.580.572.200	Setdako
2. Program Pengelolaan Keragaman Budaya	1.190.470.000	1.612.317.000	Disdikpora
11. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	16.940.217.375	14.066.796.820	
1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	973.411.700	616.760.797	Bappeda
2. Program Penelitian dan Pengembangan	1.515.900.100	1.502.905.000	Bappeda
3. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	965.260.000	637.810.000	Inspektorat Kota
4. Program Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah	243.346.250	227.596.250	Setdako
6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.503.190.000	1.324.745.000	BPKD
7. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	275.568.000	252.168.000	BPKD
8. Program Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Daerah	422.897.000	420.667.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsifan
9. Program Peningkatan Akses Kualitas Informasi Publik	2.388.755.325	2.580.200.750	Dinas Kominfo
10. Program e-Government	7.990.214.000	6.068.622.750	Dinas Kominfo
11. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	663.675.000	435.321.273	BKPSDM

12. Terselenggaranya Pelayanan Publik	1.728.238.500	1.737.003.892	Dinas Duk Capil
1. Program Penataan Administrasi Kependudukan	1.059.569.000	1.065.034.392	Dinas Duk Capil
2. Program Koordinasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	438.730.000	458.730.000	Setdako
3. Program Pelayanan Terpadu Satu Pintu	38.939.500	38.939.500	DPMPSTP
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	191.000.000	174.300.000	Dinas Duk Capil
13. Meningkatkan Peran Serta Kelompok /Lembaga Kemasyarakatan Dalam Pembangunan	9.785.635.000,00	10.272.885.250	
1. Program Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan	3.046.756.000	3.022.950.000	Kecamatan PP Timur
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan	3.094.735.000	3.073.933.250	Kecamatan PP Barat
3. Program Peningkatan Kelembagaan Masyarakat Kelurahan	2.186.607.000	2.639.807.000	Dinas Sosial PPKBPPPA
4. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	1.116.012.000	1.194.670.000	Disdikpora
5. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	341.525.000	341.525.000	Dinas Sosial PPKBPPPA
14 Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan	343.904.000,00	448.414.000	
1. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	343.904.000	448.414.000	Dinas Sosial PPKBPPPA


 WALIKOTA PADANG PANJANG
 FADLY AMRAN, SBA



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl.Sutan Syahrir No. 178 Padang Panjang
Telp: (0752) 82200 – Faks : (0752) 82870

Email:kominfo.pdgpanjang@gmail.com - Website:www.padangpanjangkota.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SONNY BUDAYA PUTRA, AP.M.Si

Jabatan : SEKRETARIS DAERAH

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FADLY AMRAN, BBA

Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
WALIKOTA PADANG PANJANG
FADLY AMRAN, BBA

Padang Panjang, 25 November 2019

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS DAERAH

SONNY BUDAYA PUTRA, AP.M.Si
NIP.19750331 199501 1 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			SEBELUM	SESUDAH
1.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP	B (60,1)	B (60,1)
2.	Meningkatnya Pelayanan Publik	Nilai LPPD	Tinggi	Tinggi
3.	Meningkatnya aktivitas keagamaan di masyarakat	Standar Pelayanan Minimal	84,67	84,67
4.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kebijakan sektor perekonomian	Persentase aktivitas kegiatan keagamaan dimesjid	38,82	38,82
5.	Meningkatnya pencapaian pembangunan daerah	Persentase terselenggaranya kebijakan umum sektor perekonomian Kota Padang Panjang	80	80
		Persentase pencapaian kegiatan Pembangunan	70	70

No.	PROGRAM	ANGGARAN	
		Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)
1.	Pemberdayaan Pemerintah dan Kelurahan	7.300.000	7.300.000
2.	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	3.565.435.000	3.787.776.402
3.	Kerjasama Informasi dengan Media Masa	302.080.000	302.080.000
4.	Penataan Peraturan Perundang-undangan	720.890.000	709.540.000
5.	Penataan Daerah Otonomi baru	58.000.000	58.000.000
6.	Penataan Kelembagaan dan Penataantatalaksana	113.075.000	112.925.000
7.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	438.730.000	458.730.000
8.	Peningkatan Koordinasi Perekonomian Daerah	195.000.000	195.000.000
9.	Penataan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	453.430.000	312.610.000
10.	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	243.346.250	227.596.250
11.	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	9.360.475.000	8.590.572.200

Padang Panjang, 25 November 2019

SEKRETARIS DAERAH

SONNY BUDAYA PUTRA, AP.M.SI
 NIP.19750331 199001 1 001

WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN, BBA



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Sutan Syahrir No. 178 Telp. (0752) 485152 Fax. (0752) 485152
Padang Panjang 27118

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZIA ULFIKRI. SE.

Jabatan : Plt. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA PADANG
PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : FADLY AMRAN, BBA

Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN, BBA

Padang Panjang, 25 November 2019

PIHAK PERTAMA
Plt. KEPALA BPKD

ZIA UI FIKRI. SE.

Nip. 19811026 200802 1 001



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019
 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
 KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			SEBELUM	SESUDAH
1.	Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah	Ketepatan penyajian laporan keuangan sesuai SAP	Tepat	Tepat
2.	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan PAD	Persentase Peningkatan Pendapatan asli Daerah	5%	5%

No.	PROGRAM	ANGGARAN	
		Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	6,626,619,000	4,065,816,000
2.	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1,503,190,000	1,324,745,000
3.	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1,627,200,000	1,037,079,900
4.	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	273,568,000	252,168,000

WALIKOTA PADANG PANJANG
 FADLY AMRAN, BBA

Padang Panjang, 25 November 2019
 PIA KEPALA BADAN PENGELOLA
 KEUANGAN DAERAH
 KOTA PADANG PANJANG
 ZIA FIKRI, SE
 NIP. 19811026 200802 1 001





PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH, KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JLN. KH. Ahmad Dahlan No.5 (0752) 82847 Guguk Malintang, Padang Panjang
Email : Bpbd.kesbangpol.pp@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MARWILIS, SH, M.SI

Jabatan : KEPALA BPBD, KESBANGPOL KOTA PADANG PANJANG
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FADLY AMRAN, BBA

Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN, BBA

Padang Panjang, 25 November 2019

PIHAK PERTAMA
KEPALA BPBD, KESBANGPOL

MARWILIS, SH, M.Si

NIP. 19610701 198203 1 008

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			SEBELUM	SESUDAH
1.	Meningkatnya respon penanganan bencana	Respon time Tanggap Darurat	10 menit	10 menit
2.	Meningkatnya kualitas keamanan dan kerukunan hidup di masyarakat	Persentase konflik sosial yang ditindaklanjuti	100%	100%

No. PROGRAM


1. Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Alam
2. Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat
3. Peningkatan dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
4. Peningkatan Pemahaman Politik Masyarakat dan Stabilitas Politik Daerah

ANGGARAN

Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)
1.756.381.000	1.756.381.000
116.730.000	116.730.000
178.695.000	178.695.000
1.091.613.000	1.018.441.250

WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN, BBA

Padang Panjang, 25 November 2019
KEPALA BPBD, KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

MARWILIS, SH, M.SI
NIP. 19810701 198203 1 008





PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Anas Karim No. 14 Pasar Usang Telp. (0752) 83487 Padang Panjang

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARKES REFAGUS, S.Sos

Jabatan : PIt .KEPALA DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA
BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FADLY AMRAN, BBA

Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
WALIKOTA PADANG PANJANG
FADLY AMRAN, BBA

Padang Panjang, 25 November 2019
PIHAK PERTAMA
PIt .KEPALA DINAS PPKB PPPA
ARKES REFAGUS, S.Sos
NIP. 19651112 198602 1 002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019
KEPALA DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			SEBELUM	SESUDAH
1	Meningkatkan cakupan PMKS yang mendapatkan pelayanan sosial	Persentase PMKS yang tertangani	45,0%	45,0%
2	Meningkatkan peran serta kelompok/lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif	70,0%	70,0%
3	Meningkatkan pemenuhan hak anak	Tingkat capaian Kota Layak Anak	Madya	Madya
4	Meningkatkan pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak	Predikat APE (Anugrah Parahita Ekapraya)	Pratama	Pratama
5	Meningkatkan pelayanan kependudukan dan Keluarga Berencana	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,40%	2,40%

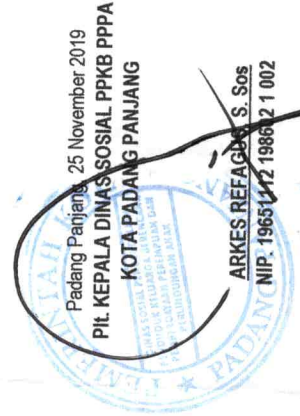
No.

Program

1. Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
2. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
3. Rehabilitasi sosial korban bencana
4. Pembinaan Anak Terlantar
5. Pembinaan Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
6. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
7. Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
8. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
9. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
10. Peningkatan kelembagaan masyarakat kelurahan
11. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan
12. Peningkatan pemberdayaan kelembagaan adat
13. Keluarga Berencana
14. Kesehatan Reproduksi Remaja
15. Pelayanan Kontrasepsi
16. Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri
17. Peningkatan Pengendalian Penduduk

Anggaran	
Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)
608,583,500	415,133,500
996,465,000	972,445,000
150,000,000	150,000,000
30,775,000	30,775,000
99,505,000	99,505,000
677,282,000	814,932,000
341,525,000	341,525,000
343,904,000	448,414,000
250,800,000	210,200,000
2,186,607,000	2,639,807,000
274,895,000	274,895,000
604,800,000	624,800,000
2,601,887,000	2,704,687,000
322,145,000	308,120,000
62,500,000	62,500,000
213,986,000	183,986,000
60,125,000	60,125,000

WALIKOTA PADANG PANJANG
FADLY AMRAN, BBA





Handwritten notes and calculations, possibly related to the diagram above. Includes some numbers and symbols that are difficult to read due to fading.

Additional handwritten notes and calculations, continuing from the previous section. Includes some numbers and symbols.

Main body of handwritten text, likely a detailed report or set of calculations. The text is dense and covers most of the page.

Continuation of the main body of handwritten text, containing further details and calculations.

Final section of handwritten text, possibly concluding the report or providing a summary. Includes some final numbers and remarks.



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG DINAS KESEHATAN

Jln.K.H.Ahmad Dahlan No.05 Padang Panjang 27128 ☎ (0752) 83146
Fax (0752) 83146 Email : dinkes.kotapadangpanjang@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. NURYANUWAR, Apt. MM, M. Kes

Jabatan : KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FADLY AMRAN, BBA

Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
WALIKOTA PADANG PANJANG
FADLY AMRAN, BBA

Padang Panjang, 25 November 2019

PIHAK PERTAMA

KEPALA DINAS KESEHATAN



Drs. NURYANUWAR, Apt. MM, M. Kes

NIP. 19620123 199101 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
DINAS KESEHATAN KOTA PADANG PANJANG**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			Sebelum	Sesudah
1	Tercapainya Masyarakat Sehat	Indeks Keluarga Sehat	0.35%	0.35%
		Persentase Stunting	17.50%	17.50%
		Angka Kematian Ibu (AKI)	0	0
		Angka Kematian Bayi (AKB)	12	12
		Persentase UHC	96.25%	96.25%

No.	Program	Anggaran	
		Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)
1.	Obat dan Perbekalan Kesehatan	886,278,000	884,528,000
2.	Upaya Kesehatan Masyarakat	11,068,556,000	10,718,515,800
3.	Pengawasan Obat dan Makanan	96,780,000	91,001,500
4.	Promosi kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	271,125,000	239,425,000
5.	Perbaikan Gizi Masyarakat	198,074,000	198,074,000
6.	Pengembangan Lingkungan Sehat	729,200,000	695,395,000
7.	Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Menular	303,523,000	322,570,500
8.	Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas pembantu dan jaringannya	635,497,000	699,497,000
9.	Pelayanan Kesehatan Anak Balita	33,500,000	33,500,000
10.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	332,565,000	332,565,000
11.	Peningkatan kesehatan ibu melahirkan dan anak	401,500,000	401,500,000
12.	Standarisasi Pelayanan Kesehatan	233,727,500	233,727,500

PWALIKOTA PADANG PANJANG

FADLAN AMRAN, BBA

Padang Panjang, 25 November 2019
**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA PADANG PANJANG**

Drs. NURYANUWAR, Apt. MM, M.Kes
 NIP. 19620123 199101 1 001



**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jln. Urip Sumoharjo No. 532 Padang Panjang Kode Pos 27128
Telp. (0752) 485312 Fax. (0752) 485312

Email: kpada.padangpanjang@gmail.com – website: www.padangpanjangkota.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ALVISENA,ST.MT

Jabatan : KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA PADANG
PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FADLY AMRAN, BBA

Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**PIHAK KEDUA
WALIKOTA PADANG PANJANG**

FADLY AMRAN, BBA

Padang Panjang, 25 November 2019

**PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN**



ALVISENA,ST.MT

NIP. 19750825 200212 1 004

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KOTA PADANG PANJANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			SEBELUM	SESUDAH
1.	Meningkatnya kinerja pelayanan perpustakaan	Persentase Peningkatan Kunjungan Masyarakat Ke Perpustakaan	7%	7%
2.	Meningkatnya penyelamatan, pembinaan dan penataan arsip secara baku	Persentase Pencipta Arsip yang Melaksanakan Kearsipan Secara Baku	30%	30%

ANGGARAN

Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)
2,493,971,000	2,517,999,504
422,897,000	420,667,000

No. PROGRAM

1. Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
2. Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

1. WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLIL AMRAN, BBA





PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
JL. BUNDO KANDUANG NO. 1 TELP. (0752) 82156, FAX. (0752) 82128
PADANG PANJANG

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. HERMAN, MM

Jabatan : PIt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PADANG
PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FADLY AMRAN, BBA

Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN, BBA

Padang Panjang, 22 November 2019

PIHAK PERTAMA
PIt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLAHRAGA

Drs. HERMAN, MM
NIP. 19631003 198703 1 004



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019
LAMPIRAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PADANG PANJANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Sebelum	sesudah
1	Meningkat dan meratanya kualitas pendidikan dengan SDM yang unggul, berdaya saing dan berkarakter Islami	1 Angka Melanjutkan SD	100,00%	100,00%
		2 Angka Melanjutkan SMP	100,00%	100,00%
		3 Rata-rata nilai UN SD	77,00%	77,00%
		4 Rata-rata nilai UN SMP	57,00%	57,00%
2	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman budaya daerah yang diwujudkan dalam karakter dan pelestarian budaya	Pelaku Budaya berperan aktif dalam melestarikan kebudayaan minimal 4500 orang (7,5% dari total Penduduk Padang Panjang)	2500 orang	2500 orang
3	Terfasilitasinya pembinaan olahraga berkesinambungan dan kompetisi olahraga yang terstruktur serta berkelanjutan	Jumlah Prestasi Olahraga	6 Prestasi tingkat Provinsi	6 Prestasi tingkat Provinsi
4	Terfasilitasinya pembinaan pemuda berkarakter kuat dan bertaqwa	Jumlah Pemuda Berprestasi	3 Prestasi tingkat Provinsi	3 Prestasi tingkat Provinsi
5	Meningkatnya angka melanjutkan siswa miskin ke perguruan tinggi	Angka melanjutkan siswa miskin ke perguruan tinggi	0,05	0,05

No Program

No	Program	Anggaran	
		Sebelum	Sesudah
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	4.773.175.000	4.548.796.000
2.	Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	50.079.658.000	42.210.562.128
3.	Pendidikan Non Formal	1.267.461.000	1.134.221.000
4.	Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	2.908.676.250	3.149.712.250
5.	Manajemen Pelayanan Pendidikan	2.062.488.500	2.512.338.500
6.	BOS	7.480.000.000	7.850.017.890
7.	Penkantaran peran serta Kepemudaan	1.116.012.000	1.194.670.000
8.	Pembinaan dan Pemasyarakan olahraga	1.474.420.000	1.334.395.000
9.	Peningkatan sarana dan prasarana olahraga	1.155.000.000	1.085.000.000
10.	Pengelolaan Keragaman Budaya	1.190.470.000	1.612.317.000

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
 Padang Panjang, 22 November 2019



WALIKOTA PADANG PANJANG
 FADLY AMRAN



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

JalanSutan Syahrir No. 189,Telp/Fax. (0752) 83143
KelurahanSilaingBawahKecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang 27118
e-mail: disdukcapil@padangpanjang.go.id-Website:dukcapil.padangpanjang.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. MAINI, MM

Jabatan : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PADANG
PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

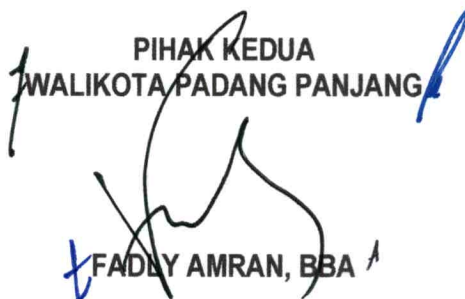
Nama : FADLY AMRAN, BBA

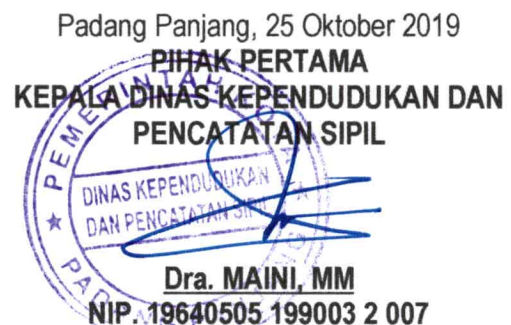
Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

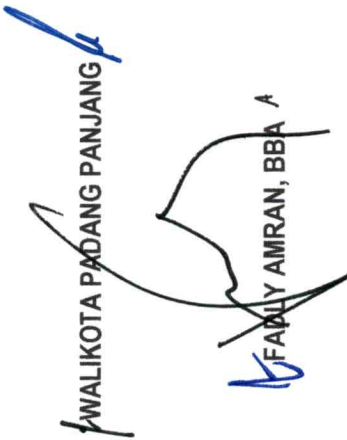
PIHAK KEDUA
WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN, BBA

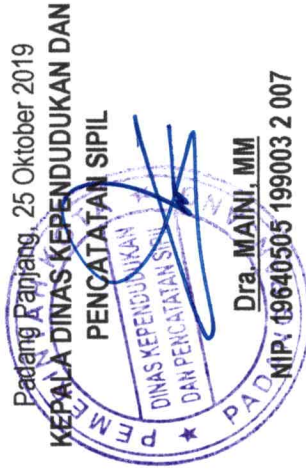
Padang Panjang, 25 Oktober 2019
PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

Dra. MAINI, MM
NIP. 19640505 199003 2 007

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			SEBELUM	SESUDAH
1.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Efektif dan Efisien	Lama waktu pelayanan dokumen administrasi kependudukan	45 menit	45 menit

No.	PROGRAM	Sebelum (Rp)	ANGGARAN	Sesudah (Rp)
1.	Penataan Administrasi Kependudukan	1.059.569.000		1.065.034.392
2.	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	191.000.000		174.300.000


WALIKOTA PADANG PANJANG
FAMILY AMRAN, BBA A

Padang Panjang, 25 Oktober 2019
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Dra. MAINI, MM
NIP. 19640505 199003 2 007



**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PERUMAHAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**

JL. KH. Ahmad Dahlan No.1 Telp (0752) 485541 Padang Panjang

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WITA DESI SUSANTI, ST
Jabatan : KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FADLY AMRAN, BBA
Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku Atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN, BBA

Padang Panjang, 25 November 2019

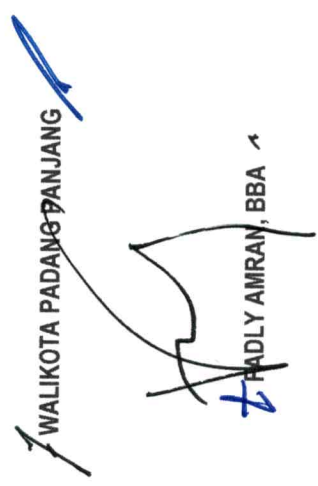
PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PERKIM LH

WITA DESI SUSANTI, ST
NIP. 19741223 200212 2 002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			SEBELUM	SESUDAH
1	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman	1. Persentase permukiman layak huni	96%	90%
2	Meningkatnya kualitas Air, Udara dan Tutupan lahan	1. Indeks Kualitas Air (IKA)	40,50 – 41,40	40,50 – 41,40
		2. Indeks Kualitas Udara (IKU)	90 – 93,5	90 – 93,5
		3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	65,26	65,26
3	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin	1. Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	61,92%	61,92%

No.	Program	Anggaran	
		Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)
1.	Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Permukiman	10.569.965.000,-	9.736.438.264,-
2.	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Perkotaan	7.836.171.350,-	8.042.821.350,-
3.	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan	1.076.520.000,-	1.073.265.000,-
4.	Pengendalian Pencemaran, Perusakan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam	980.700.000,-	784.367.800,-
5.	Pembangunan Berkelanjutan	21.228.000,-	25.028.000,-
6.	Pengendalian Perubahan Iklim	130.275.000,-	129.075.000,-
7.	Bangunan Tempat Tinggal dan Pemberdayaan Komunitas Permukiman	892.750.000,-	858.552.000,-

WALIKOTA PADANG PANJANG

HADLY AMRAN, BBA

Padang Panjang, 25 November 2019
KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PADANG PANJANG

WITA DESI SUSANTI, ST
NIP. 19741223 2000212 2 002



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Soekarno-Hatta No. 104 Telp. (0752) 82565 Fax. (0752) 82565 Padang Panjang

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DELFIANTO,S.ST.MT

Jabatan : PIt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FADLY AMRAN, BBA

Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
WALIKOTA PADANG PANJANG
FADLY AMRAN, BBA

Padang Panjang, 25 November 2019
PIHAK PERTAMA
PIt. KEPALA DINAS PUPR
DELFIANTO,SST.MT
NIP. 19730802 199903 1 001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA PADANG PANJANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			SEBELUM	SESUDAH
1	Meningkatnya infrastruktur dasar publik yang sesuai standar	1. Persentase sarana infrastruktur dasar publik dalam kondisi baik	65,14%	65,14%
		2. Persentase rumah tinggal bersanitasi layak	79%	79%
		3. Proporsi Rumah Tangga dengan akses berkelanjutan dengan air minum layak	100%	100%
2	Meningkatnya kesesuaian guna lahan dengan rencana tata ruang	4 Indeks Penilaian Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Tata Ruang	2,70%	2,70%

No.	Program	Anggaran	
		Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)
1.	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik	11.811.680.000	7.009.177.170
2.	Perencanaan dan pembinaan jasa konstruksi	318.135.000	300.865.000
3.	Pembangunan jalan dan Jembatan	10.119.550.000	13.934.675.074
4.	Pembangunan dan Pemeliharaan Trotoar	3.729.975.000	3.507.508.499
5.	Pembangunan saluran Drainase/ Gorong - gorong	300.000.000	400.000.000
6.	Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalanan dan jembatan	12.398.855.000	10.143.212.400
7.	Pengembangan , Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan pengairan Lainnya	2.229.661.000	2.170.415.400
8.	Sarana dan Prasarana Kebinarmataraan	702.150.000	936.455.309
9.	Bangunan Air Kotor Perkotaan	2.373.749.600	2.346.037.200
10.	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	3.629.000.000	3.373.500.000
11.	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Limbah	3.428.108.000	3.595.452.438
12.	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	4.490.007.550	3.681.531.658
13.	Perencanaan, Penataan, Pemanfaatan, Pengendalian Pemanfaatan Ruang	728.098.800	419.098.800



WALIKOTA PADANG PANJANG
FADLY AMRAN, BBA

Padang Panjang, 25 November 2019



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Sutan Syahrir Nomor 150 Silaing Bawah Telepon/Fax (0752) 485395
email: dpmptsp_padangpanjang@yahoo.co.id Kode Pos: 27118

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EWASOSKA, SH

Jabatan : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FADLY AMRAN, BBA

Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN, BBA^A

Padang Panjang, 25 November 2019
PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PTSP

EWASOSKA, SH
NIP. 19750103 200003 1 003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			SEBELUM	SESUDAH
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya nilai investasi	Nilai investasi	20 M	20 M
2.	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Persentase peserta pelatihan yang ditempatkan	30%	30%
3.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	84	84

No.	Program	Anggaran	Sesudah (Rp)
1.	Peningkatan Kesempatan Kerja		55,250,000
2.	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		294,150,000
3.	Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu		38,939,500

WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN, BBA

Padang Panjang, 25 November 2019
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PADANG PANJANG

EWASOSKA, SH
 NIP. 19750103 200003 1 003



**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR**

Jalan H. Sumanik No.1 Telp. (0752) 82894
Padang Panjang, 27124

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DONI RAHMAN, S.Pd.I

Jabatan : CAMAT PADANG PANJANG TIMUR KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FADLY AMRAN, BBA

Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN, BBA

Padang Panjang, 25 November 2019
PIHAK PERTAMA
CAMAT PADANG PANJANG TIMUR

DONI RAHMAN, S.Pd.I
NIP. 19780720 200604 1 012

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019
KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			SEBELUM	SESUDAH
1.	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan	Persentase realisasi anggaran SATIMISAKE	85%	85%
2.	Meningkatkan pemberdayaan Masyarakat	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan / kelurahan	21%	21%
3.	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kelurahan	Nilai kepuasan Masyarakat terhadap layanan kecamatan / kelurah	80%	80%

NO. PROGRAM

1. Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan / Kelurahan
2. Peningkatan Pelayanan Kedinasakan Camat
3. Peningkatan pemberdayaan kelembagaan masyarakat kecamatan/ kelurahan
4. Peningkatan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan
5. Percepatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

JUMLAH DANA

ANGGARAN	SEBELUM		SESUDAH	
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH
	308,045,500	277,831,000	10,100,000	10,100,000
	3,182,592,000	3,239,222,000	3,046,756,000	3,022,950,000
	3,141,852,500	3,127,535,500	13,652,958,900	13,338,857,800

WALIKOTA PADANG PANJANG
FADLI AMRAN, BBA





PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Prof. Dr. Hamka No. 87 Telp./Fax (0752) 82815 Padang Panjang 27114
Email : kominfo.kotapadangpanjang@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabilitas serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. AMPERA, SH. M.Si

Jabatan : Plt . KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FADLY AMRAN, BBA

Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku Atasan Langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN, BBA

Padang Panjang, 25 November 2019

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

Drs. AMPERA, SH. M.Si

NIP. 19680101 199803 1 010

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA PADANG PANJANG**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			Sebelum	Sesudah
1	Meningkatnya Kinerja Pemerintah yang Responsif, Efisien, Efektif, Transparan dan Partisipatif berbasis teknologi informasi	Indeks SPBE	1.86%	1.86%
2	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Persentase Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik	71%	71%
3	Tersedia Data Statistik Sektoral yang Memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase Data Statistik Sektoral Yang Terpublikasi	25%	25%

NO.

1. e-Government
2. Pengembangan Data, Informasi Statistik Sektoral
3. Persandian dan Pengamanan Informasi
4. Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik

Anggaran	
Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)
7,990,214,000	6,068,662,750
58,335,000	48,335,000
23,520,000	23,520,000
2,388,745,325	2,580,200,750

WAKIL WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN, BBA

Padang Panjang, 25 November 2019

Pt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Drs. AMPERA, SH. M.Si

NIP. 19630101199803 1 010



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan M.Yamin No. 88 Telp. 0752-82024 Padang Panjang

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. AFRIZAL, M.Pd

Jabatan : Pjt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FADLY AMRAN, BBA

Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN, BBA

Padang Panjang, 25 November 2019

PIHAK PERTAMA
Pjt. KEPALA BKPSDM



Drs. AFRIZAL, M.Pd
NIP. 19640612 199801 1 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA PADANG PANJANG


NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			SEBELUM	SESUDAH
1.	Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks profesionalitas ASN	69	60

No. PROGRAM

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
3. Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Kepegawaian
4. Pendidikan Kedinasan

ANGGARAN	
Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)
663,675,000	435,321,273
1,492,747,500	1,427,445,000
39,872,500	50,200,000
649,000,000	60,000,000

WALIKOTA PADANG PANJANG

Padang Panjang, 25 November 2019
PEM. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM KOTA PADANG PANJANG

Drs. AFRIZAL, M.Pd
 NIP. 19640612 199801 1 001

FADLY AMRAN, BBA



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Sutan Syahrir No.324 Telp. (0752) 84506 padang panjang 27118

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AMIR HAMZAH,ST

Jabatan : Plt. INSPEKTUR DAERAH KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FADLY AMRAN, BBA

Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
WALIKOTA PADANG PANJANG
FADLY AMRAN, BBA

Padang Panjang, 25 November 2019
PIHAK PERTAMA
Plt. INSPEKTUR
AMIR HAMZAH,ST
NIP. 19620824 198303 1 006



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019
INSPEKTORAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET		
			SEBELUM	SESUDAH	
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1	Persentase OPD yang Memiliki Nilai Evaluasi SAKIP Oleh Inspektorat Minimal B dan CC	30%	30%
2.	Meningkatnya Penerapan Zona Integritas	2	Persentase OPD yang mendapatkan predikat WBBM dan WBK	4%	4%

No. Program

1. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

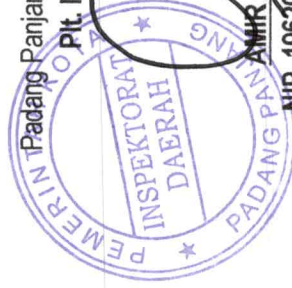
Anggaran

Sebelum (Rp) 965,260,000
Sesudah (Rp) 637,810,000

WALIKOTA PADANG PANJANG

Padang Panjang, 25 November 2019

Pt. INSPEKTUR



FADLY AMIRAN, BBA

AMIR HAMZAH, ST
NIP. 19620824 198303 1 006



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG DINAS PARIWISATA

Komplek Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau (PDIKM)
Silaing Bawah Telepon/Fax. (0752) 84164 Padang Panjang

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MEDI ROSDIAN, S.Sos, M.Si

Jabatan : KEPALA DINAS PARIWISATA KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FADLY AMRAN, BBA

Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN, BBA

Padang Panjang, 25 November 2019

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PARIWISATA

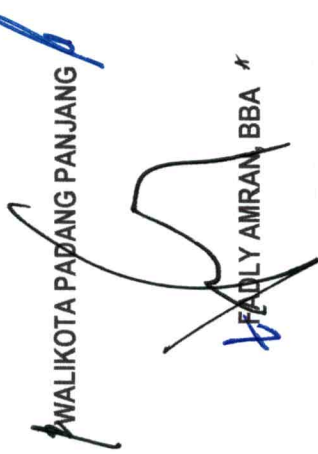
MEDI ROSDIAN, S.Sos, M.Si
NIP. 19751028 200212 1 003




LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019
DINAS PARIWISATA KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			SEBELUM	SESUDAH
1.	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan	655.841 orang	655.841 orang

NO	PROGRAM	ANGGARAN	
		Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)
1.	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	2,385,225,000	2,494,665,000
2.	Pengembangan Destinasi Pariwisata	2,664,316,000	2,664,316,000
3.	Pengembangan Kemitraan	197,199,000	106,859,000
4.	Pengembangan Objek Wisata Unggulan	767,110,000	767,110,000
	JUMLAH	6,013,850,000	6,032,950,000

WALIKOTA PADANG PANJANG

 EADLY AMRAN, BBA *

Padang Panjang, 25 November 2019
 KEPALA DINAS PARIWISATA

 MEDI ROSDIAN, S.Sos, M.Si
 NIP. 19751028 200212 1 003



**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 4 Telp. (0752) 83147-83148 Fax 484623 Padang Panjang
Email: kominfo.pdgpanjang@gmail.com – Website: www.padangpanjangkota.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WELDA YUSAR. ST. MT
Jabatan : Plt. KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FADLY AMRAN, BBA
Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN, BBA

Padang Panjang, 25 November 2019

PIHAK PERTAMA
Plt. KEPALA BAPPEDA KOTA PADANG
PANJANG

WELDA YUSAR. ST. MT
NIP. 19720810 199903 2 008



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			SEBELUM	SESUDAH
1.	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase rata-rata ketercapaian sasaran daerah	70%	70%

No. PROGRAM

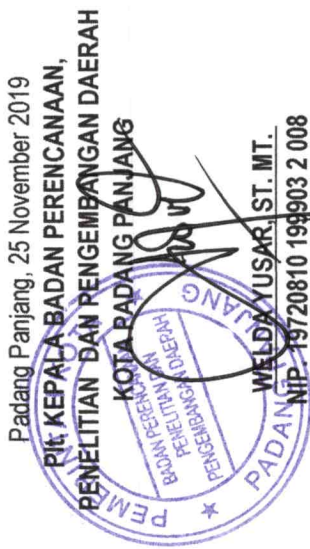
1. Pengembangan Data dan Informasi
2. Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
3. Perencanaan Pembangunan Daerah
4. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
5. Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya
6. Penelitian dan Pengembangan
7. Penguatan Inovasi Daerah

ANGGARAN

Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)
133.399.800,-	71.650.000,-
144.174.500,-	104.426.800,-
973.411.700,-	616.760.797,-
16.014.800,-	10.144.800,-
275.046.300,-	243.696.000,-
1.515.900.100,-	1.502.905.000,-
46.330.000,-	76.429.800,-

WALIKOTA PADANG PANJANG

FFADLY AMRAN, BBA





**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA
KECIL DAN MENENGAH**

Jln. St. Syahrir No. 124 Telp. (0752) – 82243 Fax (0752) – 82243 PADANG PANJANG - 27118

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARPAN, SH

Jabatan : KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FADLY AMRAN, BBA

Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
WALIKOTA PADANG PANJANG
FADLY AMRAN, BBA

Padang Panjang, 25 November 2019
PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
ARPAN, SH
NIP. 19611111 198603 1 018

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			SEBELUM	SESUDAH
1.	Meningkatnya produktifitas sektor perdagangan	Persentase kenaikan nilai volume perdagangan	7.91%	7.91%
2.	Meningkatnya produktifitas sektor perindustrian	Persentase peningkatan produktivitas IKM	1.37%	1.37%
3.	Meningkatnya koperasi aktif berpola syariah	Persentase peningkatan aset dan omset koperasi berpola syariah	12.00%	12.00%
4.	Meningkatnya skala usaha mikro kecil	Persentase peningkatan skala UMK	0.51%	0.51%
5.	Meningkatnya pendapatan masyarakat di sektor UMK	Persentase peningkatan pendapatan masyarakat miskin yang bergerak di sektor UMK	41.00%	41.00%
6.	Pengembangan wirausahawan	Persentase peningkatan aset dan omset wirausahawan	0.71%	0.71%

No.	PROGRAM	ANGGARAN	
		Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)
1.	Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah	1,469,950,000	1,465,530,000
2.	Pengembangan sistem Pendukung Usaha Bagi UKM	467,000,000	529,490,000
3.	Peningkatan kualitas Kelembagaan Koperasi	734,340,000	66,284,000
4.	Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	2,458,863,000	4,395,973,000
5.	Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	197,545,000	197,545,000
6.	Pengembangan industri kecil menengah	1,343,544,000	1,267,382,000
7.	Pengembangan sentra- sentra industri potensial	720,070,000	709,420,000

WALIKOTA PADANG PANJANG
FADLYAMIRAN, BBA

Padang Panjang, 25 November 2019
KOTA PADANG PANJANG
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM
KOPERASI USAHA KECIL
DAN MENENGAH
ARPAN, SH
 NIP. 19611111 198603 1 018



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

JL. H. Agus Salim No. 07 RT VI Telp. (0752) 82081 Faxes. (0752) 485775
Email: polpppadangpanjang@gmail.com - Website: www.padangpanjangkota.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZULKIFLI, SH
Jabatan : SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FADLY AMRAN, BBA
Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
WALIKOTA PADANG PANJANG
FADLY AMRAN, BBA

Padang Panjang, 25 November 2019
PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019
 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			SEBELUM	SESUDAH
1.	Meningkatnya Kinerja Sekretariat DPRD	Persentase Kinerja Sekretariat DPRD	75	75

No	Program	Anggaran
		Sebelum (Rp) sesudah
1.	Penyelenggaraan Kelembagaan DPRD	19,123,200,000 16,910,096,668
2.	Legislasi Peraturan Perundang - Undang	563,050,000 316,050,000
3.	Kerjasama Informasi dengan Media Massa	430,600,000 430,600,000



 Walikota Padang Panjang



 FADLY AMRAN, BBA

Padang Panjang, 25 November 2019
 Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota





PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Jln. Tabek Gadang Bukit Kandung Ganting No. Telp. (0752) 484250 Padang Panjang
Email:kominfo.pdgpgj@gmail.com –Website: www.padangpanjangkota.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. ARDONI

Jabatan : DIREKTUR RSUD

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FADLY AMRAN, BBA

Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


PIHAK KEDUA
WALIKOTA PADANG PANJANG
FADLY AMRAN, BBA


Padang Panjang, 25 November 2019
PIHAK PERTAMA
DIREKTUR RSUD KOTA PADANG PANJANG
dr. ARDONI
NIP. 19720513 200501 1 009

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			SEBELUM	SESUDAH
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan RSUD	1. Penilaian Akreditasi RSUD sesuai dengan Standar Akreditasi versi SNARS 1	Madya	Madya
		2. Indeks Kepuasan Masyarakat	B	B

No.	PROGRAM	ANGGARAN	
		Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)
1.	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	52.000.000.000	52.557.826.509
2.	Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	13.495.950.000	13.387.110.000


FADLY AMRAN, BBA

Padang Panjang, 25 November 2019
DIREKTUR RSUD
KOTA PADANG PANJANG

Dr. ARDONI
 NIP. 19720513 200501 1 009



**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN**

Jl. Prof M. Yamin, SH No. 02 Padang Panjang, Telp/Fax (0752) 484809
Email: polpppadangpanjang@gmail.com - Website: www.padangpanjangkota.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IRIANSYAH TANJUNG, SE, M.Si

Jabatan : PIt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FADLY AMRAN, BBA

Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN, BBA

Padang Panjang, 25 November 2019

PIHAK PERTAMA
PIL. KEPALA SATPOL PP DAN PEMADAM
KEBAKARAN



IRIANSYAH TANJUNG, SE, M.Si
NIP. 19620705 199109 1 001

REPUBLIC OF INDONESIA
DEPARTMENT OF POLICE
POLICE REGISTRATION AND IDENTIFICATION



REGISTRATION AND IDENTIFICATION

1. Name: [Faint text]
2. Date of Birth: [Faint text]
3. Place of Birth: [Faint text]
4. Address: [Faint text]
5. Occupation: [Faint text]
6. Education: [Faint text]
7. Marital Status: [Faint text]
8. Religion: [Faint text]
9. Blood Type: [Faint text]
10. Height: [Faint text]
11. Weight: [Faint text]
12. Eye Color: [Faint text]
13. Hair Color: [Faint text]
14. Signature: [Faint text]



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			SEBELUM	SESUDAH
1.	Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase penegakan PERDA	96.30%	96.30%
2.	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perlindungan masyarakat	Persentase pemberdayaan petugas satlinmas	100%	100%
3	Meningkatnya cakupan pelayanan penanganan bahaya kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan WMK	100%	100%

No. PROGRAM

1. Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
2. Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
3. Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

ANGGARAN

Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)
4,558,679,000	4,422,274,000
520,962,000	286,726,750
1,940,280,000	934,850,000

WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN, BEA

Padang Panjang, 25 November 2019

Pt. KEPALA SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG



STANKOVA
DVA
LABOR 66

20

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG DINAS PERHUBUNGAN

Jln. Prof. Dr.HAMKA No. 87 TEL.(0752) 82051
Padang Panjang 27115

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I PUTU VENDA, S.STP, M.Si

Jabatan : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FADLY AMRAN, BBA

Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


PIHAK KEDUA
WALIKOTA PADANG PANJANG
FADLY AMRAN, BBA


Padang Panjang, 25 November 2019
PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
I PUTU VENDA, S.STP, M.Si
NIP. 19770522 199511 1 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019
DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			SEBELUM	SESUDAH
1.	Meningkatnya ketertiban lalu lintas	1. Jumlah Angka Kecelakaan	37	37
2.	Meningkatnya pelayanan Angkutan Jalan	1. Persentase panjang trayek terlayani	27.02%	27.02%
		2. Persentase Kendaraan Lolos Uji Keur	97.56%	97.56%

No.	PROGRAM	ANGGARAN	
		Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)
1.	Rehabilitas Pembangunan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	202,730,000	151,050,000
2.	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	215,600,000	170,030,000
3.	Peningkatan Pelayanan Angkutan	825,719,500	868,474,700
4.	Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	598,750,000	581,750,000

WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN, BEA

Padang Panjang, 25 November 2019
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PADANG PANJANG

I PUTU VENDA, S.STP, M.Si
 NIP. 19770522 199511 1 001



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

Jl. Ahmad Yani No. 30 Kelurahan Ngalau Padang Panjang Timur
Kota Padang Panjang Kode Pos 27124. Telp./Fax (0752) 82119.

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. MULYANSRI

Jabatan : Plt. KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

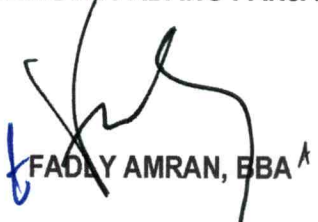
Nama : FADLY AMRAN, BBA

Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN, BBA^A

Padang Panjang, 25 November 2019
PIHAK PERTAMA
Plt. KEPALA DINAS PANGAN DAN
PERTANIAN


Ir. MULYANSRI
NIP. 19620721 199403 2 003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			SEBELUM	SESUDAH
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan	1. Skor Pola Pangan Harapan	85	85
2	Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan	1. Produksi Susu Sapi	396.000 liter/ tahun	396.000 liter/ tahun
		2. Pendapatan Pembudidaya Ikan	17.222.000 rupiah/ tahun/ RTP	17.222.000 rupiah/ tahun/ RTP
		3. Produksi Padi	6.634 ton	6.634 ton
		4. Persentase Terbentuknya Klaster Tanaman Hias	5%	5%
3	Meningkatnya Pendapatan Petani Penerima Bansos	1. Persentase Peningkatan Pendapatan Petani Penerima Bansos	2%	2%
4	Meningkatnya Pendapatan Petani	1. Persentase Peningkatan Pendapatan Petani	10%	10%

No.	Program	Sebelum (Rp)	Anggaran	Sesudah (Rp)
1.	Peningkatan Ketahanan Pangan	882.304.800		867.012.800
2.	Pengembangan Budidaya Perikanan	590.609.000		580.839.000
3.	Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian dan Perkebunan	1.783.728.000		1.775.288.000
4.	Peningkatan Kesejahteraan Petani	74.999.800		74.599.800
5.	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	307.565.000		300.065.000
6.	Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	1.973.464.300		1.886.274.800

Padang, Panjang, 25 November 2019
P. KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

KOTA PADANG PANJANG



WALIKOTA PADANG PANJANG

FADY AMRAN, BBA *



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT

Jln. Rasuna Said No.04 Kampung Manggis Telp. (0752) 7020887 Padang Panjang

Email : kominfo.pdgpanjang@gmail.com

Website: www.padangpanjangkota.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FHANDY RAMADHONA, SSTP, MM

Jabatan : CAMAT PADANG PANJANG BARAT KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FADLY AMRAN, BBA

Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
WALIKOTA PADANG PANJANG
FADLY AMRAN, BBA

Padang Panjang, 25 November 2019
PIHAK PERTAMA
CAMAT PADANG PANJANG BARAT
FHANDY RAMADHONA, SSTP, MM
NIP. 19850609 200412 1 002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019
PERANGKAT DAERAH KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
KOTA PADANG PANJANG


NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			SEBELUM	SESUDAH
1	Meningkatnya peran serta kelompok/ lembaga masyarakat dalam pembangunan	Presentase lembaga masyarakat aktif	70%	70%

No.	PROGRAM	Anggaran	Sesudah (Rp.)
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan	327.206.000	424.056.500
2.	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kecamatan	17.030.000	17.030.000
3.	Peningkatan Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan	3.679.122.400	3.851.116.900
4.	Peningkatan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan	3.094.735.000	3.073.933.250
5.	Percepatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan	3.795.127.000	3.460.919.500

WALIKOTA PADANG PANJANG

FADDY AMRAN, BBA

Padang Panjang, 25 November 2019
CAMAT PADANG PANJANG BARAT
KOTA PADANG PANJANG


FHANDY RAMADHONA, SSTP, MM
NIP. 19850609 200412 1 002